

KONTRIBUSI ORGANISASI MUHAMMADIYAH DAN NU PADA PILPRES 2019

Hardianty Zainuddin

Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: sthardiantyzainuddin16@gmail.com

Abstrak

Muhammadiyah dan NU sebagai dua organisasi Islam yang didalamnya terdapat jutaan kader sehingga organisasi ini memiliki kekuatan politik tersendiri. Hal ini menjadikan, Muhammadiyah dan NU sebagai sasaran dalam perebutan suara dukungan politik pada pilpres 2019. Dengan dukungan politik yang diberikan oleh para kader kepada paslon di pilpres 2019 memunculkan adanya isu ketidaknetralan yang diperoleh oleh Muhammadiyah dan NU. Berdasarkan hal tersebut sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan seperti apa kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah dan NU sehingga dianggap memiliki kecenderungan pada paslon tertentu di Pilpres 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang berfungsi untuk menjelaskan keterlibatan Muhammadiyah dan NU pada pilpres 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah dan NU yaitu kontribusi nilai atau norma serta kontribusi elit organisasi yang mampu dijadikan sebagai rujukan sikap politik kepada seluruh kader organisasi dalam menentukan pilihan politik mereka.

Kata Kunci: organisasi; muhammadiyah; nahdlatul ulama; pilpres 2019

Abstract

Muhammadiyah and NU as two Islamic organizations in which there are millions of cadres so that this organization has a special political power. This makes, Muhammadiyah and NU as targets in the struggle for votes of political support in the 2019 presidential election. With political support given by cadres to the candidate pair in the 2019 presidential election raised issues that have the potential to benefit, non-neutrality obtained by Muhammadiyah dan NU. Based on it, this is a research that aims to explain what Muhammadiyah and NU's contribution in accordance with the requirements of the 2019 Presidential Election. The method used in this study is a qualitative descriptive study that discusses Muhammadiyah and NU in the 2019 presidential election. The results of this research showed Muhammadiyah and NU's contribution is the contribution of values or norms as well as the contribution of organizational elites which are designed as a reference for political attitudes for all organizational cadres in determining their political choices.

Keywords: organization; muhammadiyah; nahdlatul ulama; 2019 presidential election

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi dengan warga Negara yang memiliki hak berpolitik (Rosana, 2016). Hak politik yang dimiliki warga Negara yaitu berhak memilih dan dipilih pada saat proses pemilihan umum dilakukan tanpa terkecuali masyarakat yang memiliki latar belakang sebagai kader dari organisasi (Tanjung & Saraswati, 2018). Hak memberikan suara (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) bagi setiap warga Negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Hak politik warga Negara terkait hak memilih terdapat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1). Sementara hak untuk dipilih juga tersurat pada pasal Pasal 28D ayat (3) dalam UUD 1945 (Sanusi, 2018).

Hak memilih dan dipilih yang dimiliki oleh masyarakat ini juga berlaku pada kader organisasi yang notabenehnya merupakan warga Negara Indonesia. Namun, dengan terlibatnya kader organisasi dalam setiap kontestasi pemilu akan berdampak langsung pada organisasi itu sendiri. Seperti yang terjadi pada pilpres 2019, mayoritas kader maupun elit yang berorientasi pada salah satu paslon tertentu dianggap dapat mencerminkan pilihan politik organisasi tersebut.

Pemilu presiden yang diwarnai dengan keikutsertaan berbagai organisasi Islam konservatif dan beberapa organisasi sosial keagamaan yang juga ikut andil dalam berbagai dinamika yang timbul menjelang dilaksanakannya pemilu. Organisasi sosial keagamaan menjadi salah satu organisasi yang mendapat perhatian penuh oleh masyarakat. Dua organisasi Islam yang dianggap sebagai barometer umat muslim di Indonesia yang berpegang pada *khittah* atau prinsip terbentuknya organisasi yaitu sebagai organisasi yang bergerak untuk mengatasi masalah keumatan serta netral dalam berpolitik praktis.

Muhammadiyah dalam Khittah 2012 yaitu “*khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*” menyatakan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan Islam melaksanakan Dakwah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Qodir, Nurmandi, & Yamin, 2015). Awal kehadiran NU didasarkan oleh paham *Ahlussunnah wa Al-jamaah* (Siddiq, 1980). Meskipun NU pernah menjadi partai politik pada tahun 1952 dan diresmikan di Mukhtamar ke 29 di Palembang, namun NU memutuskan untuk kembali ke khittah 1924 pada masa reformasi sampai saat ini. Di pilpres 2019, organisasi Muhammadiyah dan NU masih tetap pada pendirian mereka yaitu kembali ke khittah yaitu sebagai landasan awal terbentuknya kedua organisasi ini sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan tidak berpolitik praktis.

Kenetralan Muhammadiyah dan NU pada kontestasi pemilihan presiden 2019 diragukan oleh sebagian masyarakat, dengan melihat berbagai dinamika politik yang terjadi. Keikutsertaan KH. M'ruf Amin dan dukungan yang diberikan oleh para kiai serta tokoh-tokoh NU untuk pasangan calon Jokowi-Ma'ruf. Serta keberpihakan beberapa kader organisasi Muhammadiyah pada pasangan calon Prabowo-Sandi

terhadap dalam kontestasi pilpres menjadi hal yang melatarbelakangi isu ketidaknetralan yang diberikan kepada organisasi Muhammadiyah dan NU.

Perumusan masalah yang terdapat didalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu kontribusi apa saja yang diberikan oleh organisasi Muhammadiyah dan NU pada Pilpres 2019?

Penelitian mengenai organisasi Muhammadiyah dan NU yang ikut andil dalam kontestasi pemilu di Indonesia sudah banyak dilakukan, seperti studi yang dilakukan oleh Nurlatipah (Nasir, 2015) bertujuan untuk melihat peran kyai dan Islam sebagai agama mayoritas masyarakat kota Tasikmalaya dalam mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Studi ini menyimpulkan bahwa peran kyai sebagai tokoh masyarakat dan sebagai pemimpin keagamaan yang memiliki karisma dianggap mampu mempengaruhi perilaku memilih masyarakat terutama di kalangan santri karena hubungan diantara Kyai dan santri dinilai sakral, hal ini dikarenakan terdapat salah satu konsep yang diajarkan dalam pesantren yaitu sikap ta'zim, yakni sikap hormat dan patuhnya seorang santri kepada sosok Kyai. Keberadaan seorang Kyai dalam sebuah partai politik dianggap mampu menarik suara massa.

Studi selanjutnya membahas tentang politik Elit NU terhadap keterpilihkannya dalam pemilihan presiden di tahun 2014, penelitian ini dilakukan oleh (Nuzula, 2016) yang menyimpulkan bahwa pemihakan elit NU di Pilpres 2014 merupakan sikap pribadi karena NU telah memberikan kebebasan kepada setiap kadernya untuk andil dalam proses pemilihan meskipun terdapat faktor organisasi yang juga ikut menentukan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Effendi, 2017) menjadi bahan kajian selanjutnya. Studi ini membahas tentang fragmentasi politik pada organisasi Muhammadiyah yang berkaitan dengan elit muhammadiyah dalam pemilihan presiden di tahun 2009. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa spectrum fragmentasi politik elit Muhammadiyah sangat beragam ditandai dengan kemunculan beberapa kelompok atau ideologi politik dalam Muhammadiyah. Namun seiring dinamika politik nasional dan internal Muhammadiyah terjadi terdapat beberapa hal yang perlu diubah terkait varian kelompok yang terus beragam serta perilaku politik yang tidak monoton, tidak seragam, dan monolitik mengakibatkan terfragmentasinya sikap politik elit dalam menghadapi pemilihan presiden 2009.

Kajian literatur lainnya berasal dari studi yang dilakukan oleh (Siswanto, 2007) mengenai politik didalam organisasi suatu tinjauan menuju etika berpolitik. Studi ini menyimpulkan bahwa didalam organisasi terdapat fenomena politik yang melibatkan kekuasaan, pengaruh dan kepentingan. Setiap aktor yang berada didalam organisasi akan saling memainkan sumber kekuasaan yang dimiliki untuk mempengaruhi aktor lainnya tetapi harus tetap dalam tataran etika berorganisasi.

Berdasarkan beberapa studi atau penelitian yang terkait dengan organisasi Muhammadiyah dan NU di dalam dunia politik dan menjadi bahan kajian litelatur penulis, secara umum memperlihatkan keberpihakan elit organisasi baik di NU maupun Muhammadiyah didasari karena keberagaman perilaku politik serta adanya kebebasan dalam mempersepsikan pilihan politik bagi semua kader organisasi tetapi harus tetap

dalam tataran etika politik organisasi yang telah ditentukan. Di NU sendiri terdapat sosok Kyai yang dianggap mampu mempengaruhi perilaku memilih masyarakat khususnya di kalangan santri. Adanya dominasi Kyai ini didasari karena terdapat sebuah konsep yang membuat para santri hormat dan patuh kepada Kyai atau pemimpin mereka.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan organisasi masyarakat (ormas) sebagai objek kajian dimana ormas yang dibentuk oleh kelompok masyarakat yang berdasarkan kesamaan tujuan. James D. Mooney mengatakan bahwa organisasi merupakan bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan Bersama (Manulang, 1983). Organisasi masyarakat yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini yaitu Muhammadiyah dan NU. Dalam penentuan sikap politik dapat didasari oleh motif berpolitik yang dimiliki. Motif politik atau insentif menurut Clark dan Wilson terbagi menjadi empat bagian, yaitu: (1) Insentif Material (*material incentives*); (2) Insentif Solidaritas (*solidarity/ social incentives*); (3) Insentif Idealisme (*purposive/issue based incentives*); dan (4) Insentif Campuran (*mix incentives*) (Allen, 1992).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada (Arikunto, 2005). Peneliti mengkaji peristiwa atau gejala sosial berdasarkan sudut pandang dari informan dan dideskripsikan dengan mengumpulkan informasi mengenai gejala-gejala yang ada sesuai dengan objek penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan dengan berbagai pertimbangan yaitu: Muhammadiyah dan NU adalah organisasi yang dalam kebijakannya bersifat vertical; dan secara geografis Makassar menjadi barometer perpolitikan di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia Timur.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian menggunakan metode *snowball sampling*. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau pengambilan kesimpulan.

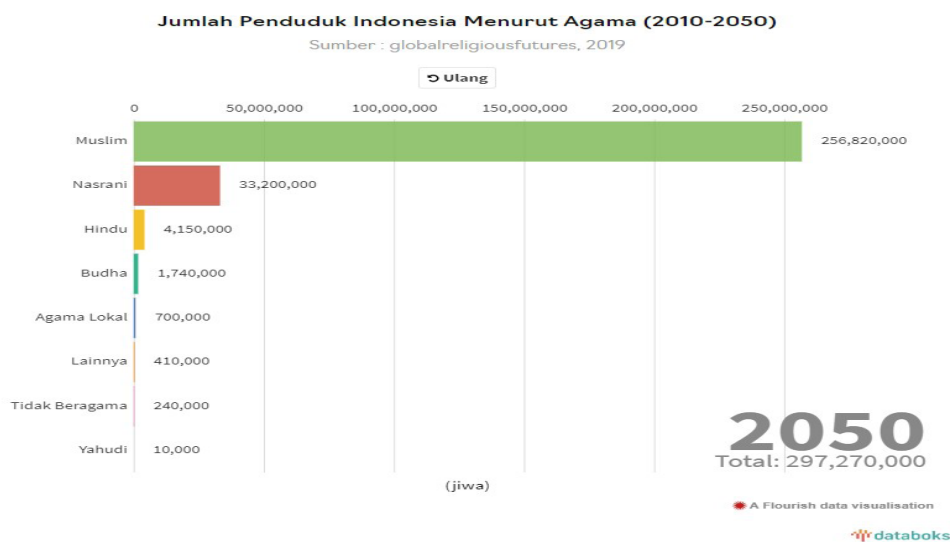
Hasil dan Pembahasan

Partisipasi politik masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam Negara yang demokratis. Partisipasi individu maupun kelompok didalam pemilihan umum merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokratis seperti Indonesia. Salah satu wujud adanya partisipasi masyarakat dalam proses politik di Indonesia dapat terlihat pada saat pemilu dilakukan. Pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019, partisipasi masyarakat ditaksir mencapai 81%.

Partisipasi politik juga ditunjukkan oleh organisasi Muhammadiyah dan NU meskipun tidak berpolitik praktis namun pada pilpres 2019, kedua organisasi ini juga

ikut berpartisipasi. Partisipasi kedua organisasi ini ditandai dengan kontribusi yang mereka berikan pada kontestasi politik pemilu 2019. Jumlah anggota dari kedua organisasi yang mencapai puluhan juta jiwa bahkan lebih dan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim mengakibatkan posisi umat Islam di Indonesia menjadi sangat kuat. Dan hal tersebut menjadikan organisasi Muhammadiyah dan NU memiliki kekuatan politik yang patut untuk diperhitungkan.

Jumlah penduduk Indonesia menurut Agama berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh databoks Indonesia per 2010-2050. Penduduk yang beragama muslim mencapai 256.820.000 jiwa, penduduk beragama Nasrani 33.200.000 jiwa, penduduk beragama Hindu 4.150.000, penduduk beragama Budha 1.740.000 jiwa, penduduk beragama lokal 700.000 jiwa, penduduk beragama lainnya 410.000 jiwa, penduduk yang tidak beragama 240.000 jiwa, dan penduduk yang menganut paham yahudi sebesar 10.000 jiwa sehingga jumlah keseluruhannya sebesar 297.270.000 jiwa .



Gambar 1
Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama (2010-2050)

Berdasarkan hasil survey tersebut penduduk yang beragama Muslim berada diposisi mayoritas dengan jumlah penduduk sebesar 256.820.000 jiwa, dibandingkan dengan jumlah penduduk dari agama yang lainnya. Dengan jumlah yang begitu besar dan juga berstatus sebagai mayoritas, organisasi Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi muslim terbesar mempunyai peran penting sebagai barometer umat muslim di Indonesia.

Muhammadiyah dan NU adalah organisasi sosial keagamaan yang meskipun tidak berpolitik praktis, namun keterlibatan kedua organisasi ini dalam bidang politik sudah lama muncul sejak awal terbentuknya Negara Indonesia sampai pada pemilihan presiden 2019. Keterlibatan organisasi Muhammadiyah dan NU ditandai dengan kedua organisasi ini memberikan kontribusi mereka baik secara langsung maupun tidak.

Jumlah kader yang dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah dan NU yang begitu besar mampu dijadikan sebagai modal politik bagi kedua organisasi ini. Selain itu, modal politik lainnya ialah kedua organisasi ini ikut menentukan arah kebijakan politik di Indonesia. Berdasarkan modal politik ini, kedua kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019-2024 berusaha untuk menarik simpati dari Muhammadiyah dan NU.

Kecenderungan pilihan politik yang jika dinampakkan oleh kedua organisasi ini, mampu memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perolehan suara dukungan yang diterima oleh pasangan calon yang didukung. Dengan posisi organisasi yang sebagai barometer umat Muslim Indonesia, membuat kecenderungan pilihan politik tersebut juga mampu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pilihan politik umat Muslim.

Kontribusi yang disalurkan oleh Muhammadiyah dan NU pada pertarungan pilpres dapat dipahami bukan hanya mengenai bagaimana dukungan suara dari anggota, tetapi secara tidak langsung. Kontribusi nilai atau norma yang disalurkan menjadi wacana tersendiri karena pada dasarnya memaknai kedua organisasi ini merupakan pemaknaan yang sarat dengan nilai. Kontribusi nilai yang muncul pada euphoria pilpres 2019 menjadi sebuah peleraian emosionalitas dari ketegangan yang terjadi di masyarakat seperti dalam penggambarannya media terkait ketegangan suasana pilpres.

Kader Muhammadiyah dan NU yang ikut aktif dalam dunia politik tersebar di berbagai partai politik Indonesia. Misalnya saja, PKB dan PAN yang menjadi tolak ukur gerakan politik yang diidentikkan oleh kedua NU dan Muhammadiyah. Hal inilah yang kemudian menjadi sarat interpretasi yang dapat menimbulkan efek fanatisme dalam masyarakat. Oleh karena itu kontribusi nilai atau norma yang diberikan menjadi pegangan dalam memberikan etika politik yang dijadikan sebagai cara untuk menstabilkan suasana politik pada pilpres 2019.

Kontribusi nilai yang diberikan oleh Muhammadiyah dan NU mempunyai peran penting dalam stabilitas kondisi yang diketahui memiliki kemajemukan sehingga dengan diberikannya bekal nilai atau moral pada setiap kader organisasi diharapkan akan lebih siap dan mampu memberikan pengaruh yang positif dalam realitas politik baik dalam pilpres maupun dalam dunia perpolitikan Indonesia secara umum.

Kontribusi Muhammadiyah dan NU secara langsung dalam pemilu 2019 ditunjukkan oleh para elit organisasi. Berbagai elit dari kedua organisasi tersebut ikut aktif dalam kontestasi politik saat itu, baik secara langsung maupun dalam bentuk pemberian dukungan. Dalam sebuah organisasi, elit merupakan kelompok minoritas yang memiliki kemampuan menjadi pedoman bagi kader organisasi lain dan memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang krusial dalam organisasi. Hal ini selaras dengan penggambaran konsep elit oleh Wright Mills yang melihat teori elit sebagai teori yang membantah pandangan pluralisme klasik yang menganggap kekuasaan didistribusikan secara merata. Namun, dalam konsep elit kekuasaan justru terkonsentrasi pada kelompok tertentu (Hadiz, 2003).

Kontribusi elit pada organisasi NU ditandai dengan keikutsertaan KH. Ma'ruf Amin yang menjabat sebagai *Rais Aam* NU. Terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai pasangan dari calon presiden Jokowi di Pilpres 2019, merupakan strategi politik yang digunakan untuk menarik simpatisan masyarakat dari kalangan NU atau *nahdliyin* bahkan umat Muslim Indonesia secara umum dengan didasarkan oleh sosok Ma'ruf Amin yang dikenal sebagai seorang ulama yang taat beragama. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim khususnya kalangan santri Indonesia menjadi sasaran dalam strategi politik ini, dan terbukti bahwa strategi ini berhasil memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf di kalangan muslim dengan presentase 50,9 persen sedangkan pasangan Prabowo-Sandi 41,6 persen.

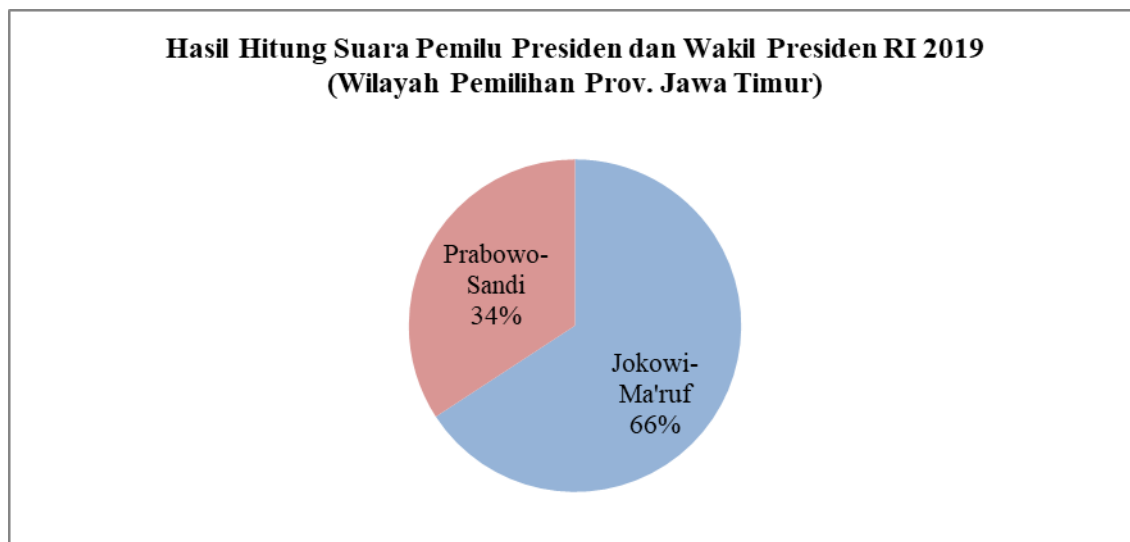
Dominasi Kiai didalam organisasi NU sangat jelas, dengan menjadikan Kiai sebagai pemimpin yang kharismatik dan disegani sehingga sosok Kiai mampu dijadikan sebagai sumber rujukan dalam berbagai masalah termasuk politik. Modal yang dimiliki seorang Kiai merupakan legitimasi teologis, seorang Kiai dianggap sebagai (*Al Ulama' Warasatul An Biya'*) atau pewaris Nabi sehingga para santri terkesan tidak akan pernah membantah apa yang dilakukan oleh Kiai. Sehingga dengan berkontribusinya Ma'ruf Amin serta dukungan yang diberikan oleh para Kiai menjadi salah satu landasan para santri juga ikut mendukung pasangan calon Jokowi-Ma'ruf.

Tingginya dukungan yang diperoleh oleh Ma'ruf Amin dalam lingkup NU juga didasari karena adanya rasa solidaritas yang dimiliki oleh kaum *nahdliyin*. Rasa solidaritas yang muncul dimaksudkan sebagai rasa kesatuan kepentingan serta rasa simpati yang ditunjukkan oleh seseorang yang berada dalam suatu kelompok atau lingkup yang sama serta memiliki kepentingan yang sama pula. Simbol *Rais Aam* yang dimiliki oleh KH. Ma'ruf Amin menjadi alasan kader NU baik struktural maupun kultural menentukan pilihan mereka pada paslon Jokowi-Ma'ruf. Seluruh santri maupun warga *nahdliyin* bersatu untuk memenangkan petinggi mereka. Kader NU mengakui bahwa secara kebijakan internal di NU mendukung sosok KH. Ma'ruf Amin karena adanya rasa solidaritas yang dimiliki oleh para kader NU untuk mendukung pemimpin mereka (*Rais Aam*) dan hal tersebut sudah menjadi rahasia umum lagi. (*wawancara 13 Januari 2020 pukul 13.03 WITA*).

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) per Februari 2019, mengatakan bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul di kalangan NU. Pasangan ini mendapatkan persentasi suara di kisaran 64,1% suara dan angka tersebut diprediksikan akan terus meningkat. *Nahdliyin* yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf memiliki harapan yang besar bahwa faham NU yaitu *ahlussunnah wal jama'ah* yang dianut juga mampu dibawah kedalam ranah pemerintahan.

Dominasi dan simbol seorang Kiai yang dimiliki oleh KH. Ma'ruf Amin memiliki pengaruh yang cukup besar pada saat pemilihan presiden berlangsung. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh unggulnya pasangan Jokowi'-Ma'ruf di Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai daerah yang berbasis *nadliyin* yang paling besar di Indonesia. Perolehan suara pada pemilu presiden 2019 menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-

Ma'ruf mendapatkan perolehan suara sebesar 66% dan pasangan Prabowo-Sandi mendapatkan perolehan suara sebesar 34%. Perolehan suara tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2
Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden RI 2019 Di Provinsi Jawa Timur

Rasa solidaritas yang dimiliki oleh kader NU terbukti mampu memberikan kontribusi suara yang besar pada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Namun hal ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa seluruh kader NU akan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Seperti yang dikatakan oleh salah satu kader NU bahwa Ma'ruf Amin yang memiliki jabatan sebagai petinggi NU dan juga sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebaiknya dijadikan sebagai penasihat dari pemerintahan dan tidak terlibat langsung sebagai kandidat calon wakil presiden (*wawancara, 15 Januari 2020 pukul 11.30 WITA*).

Politik identitas berbasis agama semakin menguat menjelang pemilihan presiden 2019, berkontribusinya Ma'ruf Amin sebagai calon wakil dari Jokowi juga merupakan strategi yang digunakan dalam peredaman isu anti ulama dan anti Islam yang sering disematkan kepada Jokowi. Strategi ini mampu "mengendalikan" kelompok Islam konservatif yang sering melontarkan isu-isu tersebut.

Kontribusi elit juga diberikan oleh organisasi Muhammadiyah, terdapat beberapa elit organisasi yang menyuarakan pilihannya pada paslon politik di pilpres 2019. Beberapa elit organisasi yang terlibat pada paslon Prabowo-Sandi, seperti Dahlin Anzar Simanjuntak yang menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Suyatno sebagai Bendahara PP Muhammadiyah, hingga Amin Rais yang merupakan mantan Ketua PP Muhammadiyah.

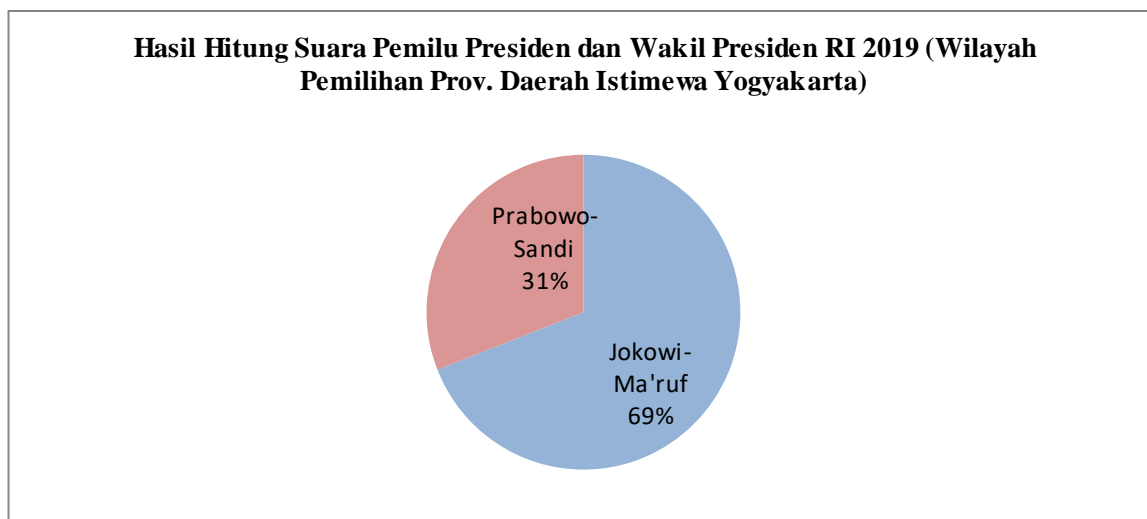
Kontribusi elit Muhammadiyah berbeda dengan kontribusi elit yang diberikan oleh NU. Di organisasi Muhammadiyah, sikap politik terfragmentasi antara elit

struktural dan elit kultural. Secara struktural organisasi, melalui ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir menyebutkan bahwa secara organisasi Muhammadiyah tidak menentukan pilihan politik pada paslon tertentu di Pilpres. Meskipun begitu Muhammadiyah tetap memberikan kebebasan bagi para kader organisasi dalam menentukan sikap politik mereka. Berbeda dengan hal tersebut, Muhammadiyah secara kultural mengharapkan bahwa Muhammadiyah mampu memberikan dukungan politik mereka pada paslon tertentu di pilpres, hal ini disampaikan oleh Amin Rais yang meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua umum tetapi secara kultural masih memiliki pengaruh dalam organisasi Muhammadiyah.

Dinamika yang terjadi dalam organisasi Muhammadiyah dalam merespon isu-isu politik di pemilihan presiden 2019 terbagi antara elit yang masih memiliki legitimasi sebagai elit kader secara struktural dan elit kultural organisasi dimana keduanya memiliki massa yang berbeda. Isu politik yang melibatkan agama mendapatkan respon yang berbeda dari elit kultural dan struktural. Elit kultural memanfaatkan isu politik yang ada, mereka beranggapan bahwa untuk merespon isu politik yang ada organisasi seharusnya ikut memberikan pandangan dan sikap politik mereka sehingga masyarakat mendapatkan pandangan dari sudut pandang organisasi islam dan mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan politik. Disisi lain, elit struktural tetap menjaga kenetralan organisasi dan tetap berada pada *khittah* organisasi yang menegaskan bahwa Muhammadiyah secara organisasi tidak berpolitik tetapi untuk para kader diberikan kebebasan dalam menentukan hak pilih mereka.

Keterpihakan Amin Rais pada paslon Prabowo-Sandi menjadi salah satu rujukan kader Muhammadiyah lainnya. Dengan melihat posisi Amin Rais sebagai mantan ketua umum PP Muhammadiyah dan juga sebagai pendiri salah satu partai yang berada pada koalisi yang sama (PAN) yang didalamnya terdapat kader Muhammadiyah menjadi alasan tidak sedikit kader Muhammadiyah memilih Prabowo-Sandi sebagai pilihan politik mereka.

Dukungan politik yang diberikan oleh Amin Rais kepada pasangan Prabowo-Sandi nampaknya tidak berpengaruh bagi pemilih yang berada di daerah Yogyakarta. Daerah tersebut merupakan daerah tempat berdirinya organisasi Muhammadiyah. Perolehan suara di Daerah Istimewa Yogyakarta di laporkan sebanyak 69% untuk pasangan Jokowi-Sandi dan 31% untuk pasangan Prabowo-Sandi. Hasil hitung perolehan suara ini dapat dilihat melalui grafik hasil hitung yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).



Gambar 3
Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden RI 2019 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Terfragmentasinya dukungan politik yang ada di organisasi Muhammadiyah disadari oleh para kader dengan alasan terbaginya suara atau dukungan politik yang ada di Muhammadiyah yang terbagi pada dua kubu yang berbeda, kader Muhammadiyah yang tersebar di berbagai partai politik yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda-beda, serta latar belakang para kader yang berbeda pula menjadi alasan dukungan politik di organisasi tersebut juga berbeda-beda. Tetapi kader yang berafiliasi secara politik ke PAN memiliki kecenderungan mengikuti pilihan politik Amin Rais yaitu berpihak pada kubu pasangan calon Prabowo-Sandi (wawancara, 17 Desember 2019 pukul 19.11 WITA).

Kontribusi elit lainnya dalam organisasi Muhammadiyah juga terlihat dengan dibentuknya tujuh kriteria pemimpin yang menggambarkan kepemimpinan profetik. Ketujuh kriteria ini dibentuk oleh kelompok tigabelas yang berisi petinggi-petinggi organisasi Muhammadiyah. Kriteria pemimpin yang telah dibentuk diharapkan mampu menjadi landasan setiap kader dalam menentukan pilihan politik mereka, namun setiap kader organisasi diberikan kebebasan dalam menafsirkan tujuh kriteria pimpinan yang telah dibentuk sebelumnya oleh kelompok tigabelas.

Organisasi Muhammadiyah dan NU sering dikaitkan dalam dunia politik, meskipun begitu kedua organisasi ini selalu berhati-hati dalam menghadapi dinamika politik yang berkembang. Jati diri organisasi Muhammadiyah dan NU adalah organisasi keagamaan sehingga sikap mereka dalam dunia politik menjadi sikap organisasi yang memainkan fungsi *lobbying* dan pendekatan-pendekatan yang lentur dan juga lebih banyak dipengaruhi oleh budaya akomodatif sehingga dengan bersentuhannya organisasi Muhammadiyah dan NU dengan politik tidak menimbulkan konfrontasi.

Kesimpulan

Kontribusi organisasi Muhammadiyah dan NU yaitu kontribusi nilai-nilai atau moral yang diberikan oleh Muhammadiyah dan NU yang dijadikan pedoman bagi para kader dalam berpolitik sehingga para kader organisasi yang ikut berpolitik mampu didasari oleh etika berpolitik yang baik. Selain itu, keikutsertaan elit organisasi dan dukungan yang diberikan kepada masing-masing pasangan calon pilpres 2019 juga merupakan kontribusi politik yang diberikan oleh organisasi Muhammadiyah dan NU.

Pencalonan KH. Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden dan mendapat dukungan dari para Kiai NU mampu memberikan kontribusi yang besar dalam kemenangan paslon Jokowi-Ma'ruf. Di organisasi Muhammadiyah, kontribusi elit tidak sekuat seperti yang ada di NU. Sikap politik yang ada pada organisasi tersebut terfragmentasi antara elit struktural dan elit kultural. Elit kultural yang memandang bahwa perlunya organisasi menentukan sikap politik mereka pada pilpres dianggap mampu dijadikan rujukan bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam menentukan pilihan politik mereka. Namun sikap yang berbeda ditunjukkan oleh elit struktural organisasi, elit struktural tetap menjunjung *khittah* perjuangan Muhammadiyah yang mengatakan bahwa organisasi tidak berpolitik praktis tetapi para kader diberikan kebebasan untuk mengekspresikan hak pilih mereka.

BIBLIOGRAFI

- Allen, Beck Paul dan Franki Sorauf. (1992). *Party Politics in America Edition*. Harper Collin Publishers. New York.
- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Manajemen penelitian*. [Google Scholar](#)
- Effendi, David. (2017). *Fragmentasi Politik Muhammadiyah: Studi Tentang Elit Muhammadiyah dalam Pemilihan Presiden Tahun 2009*. Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. [Google Scholar](#)
- Hadiz, R. V. (2003). Power and Politics in North Sumatra: The Uncompleted Reformasi “dalam Local Power and Politics in Indonesia. *Singapore. Institute of Southeast Asian Studies*. [Google Scholar](#)
- Manulang, M. (1983). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasir, Nurlatipah. (2015). Kyai dan Islam dalam Mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Kota Tasikmalaya. *Jurnal Politik Profetik*, 3(2). [Google Scholar](#)
- Nuzula, Nur. (2016). *Politik elite Nahdlatul Ulama (Nu): pemihakan dalam pemilihan presiden (Pilpres) Tahun 2014*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah. [Google Scholar](#)
- Qodir, Zuly, Nurmandi, Achmad, & Yamin, M. Nurul. (2015). *Ijtihad politik Muhammadiyah: politik sebagai amal usaha*. Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Jusuf Kalla School of Government. [Google Scholar](#)
- Rosana, Ellya. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37–53. [Google Scholar](#)
- Sanusi, Sanusi. (2018). Kebijakan Kpu dalam Melindungi Hak Pilih Warga (Studi Kasus di Kota Cirebon). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(11), 149–159. [Google Scholar](#)
- Siddiq, Ahmad. (1980). *Khittah Nahdliyyah*. Surabaya: Balai Buku. h. 11.
- Siswanto, Siswanto. (2007). Politik Dalam Organisasi (Suatu Tinjauan Menuju Etika Berpolitik). *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 10(04). [Google Scholar](#)
- Tanjung, Muhammad Anwar, & Saraswati, Retno. (2018). Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 379–399. [Google Scholar](#)

Copyright holder:

Hardianty Zainuddin (2021)

First publication right:

This article is licensed under:

